



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

POLA KLASIFIKASI ARSIP DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan diperlukan penataan arsip secara efektif dan efisien sehingga dapat berperan sebagai sumber informasi;
- b. bahwa pola klasifikasi arsip merupakan pedoman penataan arsip untuk mempermudah penemuan kembali informasi arsip yang diperlukan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pola Klasifikasi Arsip Pemerintah Kabupaten Luwu Timur perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu untuk diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Klasifikasi Arsip Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459); 49

12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kependudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA KLASIFIKASI ARSIP DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan.
6. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
7. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
8. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
9. Klasifikasi arsip adalah pengelompokan arsip yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi organisasi yang disusun secara logis dan sistematis. 

10. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
11. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
12. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan serta penyusutan arsip.
13. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
14. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
15. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
16. Fungsi adalah bentuk penyebaran urusan tertentu kepada unit kerja dan/atau satuan kerja dan menjadi pedoman untuk melakukan kegiatan sebagai tanggung jawabnya baik fungsi substantif maupun fungsi fasilitatif.
17. Kegiatan adalah jenis-jenis aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan salah satu fungsi organisasi/instansi.
18. Transaksi adalah kesepakatan para pihak dalam komunikasi kedinasan atas sesuatu obyek yang bersifat spesifik.
19. Folder adalah wadah untuk menyimpan naskah-naskah transaksi.
20. Pokok masalah adalah inti atau bagian besar dari kegiatan pemerintah yang terdiri dari kegiatan fasilitatif maupun kegiatan substantif.
21. Sub masalah adalah pengelompokan pokok masalah kedalam bagian-bagian yang sama atau sejenis.
22. Sub-sub masalah adalah pengelompokan sub masalah kedalam bagian yang lebih rinci atau kesamaan yang lebih spesifik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pola Klasifikasi Arsip dimaksudkan sebagai pedoman untuk pemberian kode dalam penomoran, pencatatan dan penataan arsip yang diciptakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan Pola Klasifikasi Arsip yakni untuk penemuan kembali arsip dinamis dalam rangka pelayanan informasi kearsipan pada Perangkat Daerah. *sp*

BAB III
POLA KLASIFIKASI ARSIP DAERAH

Pasal 3

- (1) Bentuk dan susunan pola klasifikasi arsip Daerah terdiri atas :
 - a. pokok masalah;
 - b. sub masalah; dan
 - c. sub-sub masalah.
- (2) Bentuk dan susunan pola klasifikasi arsip Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pola klasifikasi arsip Daerah wajib digunakan oleh semua Perangkat Daerah untuk keseragaman penataan arsip dan kode penomoran naskah.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Bupati memberikan pembinaan dan pengawasan penggunaan pola klasifikasi arsip Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Bimbingan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pola klasifikasi arsip Daerah pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Dinas.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pola klasifikasi arsip Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Biaya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pola klasifikasi arsip Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pola Klasifikasi Arsip Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 43

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. 

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 24 September 2019
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 24 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019 NOMOR : 21

STEMPEL PARAF KOORDINASI DPK KAB. LUWU TIMUR		
TELAH DIPERIKSA OLEH		PARAF
SEKDA		
ASISTEN		
KEPALA DPK		
SEKRETARIS DPK		
Kabid Kearsipan		

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
POLA KLASIFIKASI ARSIP DAERAH.

BENTUK DAN SUSUNAN POLA KLASIFIKASI ARSIP DAERAH

A. POKOK MASALAH DAN KODE WILAYAH

1. Pokok Masalah

000	UMUM
100	PEMERINTAHAN
200	POLITIK
300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN
400	KESEJAHTERAAN RAKYAT
500	PEREKONOMIAN
600	PEKERJAAN UMUM
700	PENGAWASAN
800	KEPEGAWAIAN
900	KEUANGAN

2. Kode Wilayah

Kode wilayah merupakan Kode untuk menunjukkan pembagian wilayah. Dengan memperhatikan prinsip, kode wilayah disusun sebagai berikut :

- 73 Sulawesi Selatan
- . 01 Makassar
 - . 02 Gowa
 - . 03 Jeneponto
 - . 04 Takalar
 - . 05 Maros
 - . 06 Pangkajene Kepulauan
 - . 07 Bantaeng
 - . 08 Bulukumba
 - . 09 Selayar
 - . 10 Sinjai
 - . 11 Bone
 - . 12 Soppeng
 - . 13 Wajo
 - . 14 Palopo
 - . 15 Luwu Utara
 - . 16 Luwu
 - . 17 Luwu Timur
 - . 18 Toraja
 - . 19 Toraja Utara
 - . 20 Parepare
 - . 21 Enrekang
 - . 22 Sidenreng Rappang
 - . 23 Pinrang
 - . 24 Barru

Kabupaten dapat membentuk kode wilayah sendiri untuk kecamatan di wilayahnya dan kecamatan dapat membentuk kode wilayah tersendiri untuk kelurahan dan desa di wilayahnya. 

B. SUB MASALAH

Kode Klasifikasi

000 UMUM

- 010 URUSAN DALAM
- 020 PERALATAN
- 030 KEKAYAAN DAERAH
- 040 PERPUSTAKAAN DOKUMENTASI/KEARSIPAN/SANDI
- 050 PERENCANAAN
- 060 ORGANISASI/KETATALAKSANAAN
- 070 PENELITIAN
- 080 KONFERENSI/RAPAT/SEMINAR
- 090 PERJALANAN DINAS

100 PEMERINTAHAN

- 110 PEMERINTAHAN PUSAT
- 120 PEMERINTAHAN PROVINSI
- 130 PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA
- 140 PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN
- 150 LEGISLATIF MPR/DPR
- 160 DPRD PROVINSI TAMBAHKAN KODE WILAYAH
- 170 DPRD KABUPATEN TAMBAHKAN KODE WILAYAH
- 180 HUKUM
- 190 HUBUNGAN LUAR NEGERI

200 POLITIK

- 210 KEPARTAIAN
- 220 ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- 230 ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL
- 240 ORGANISASI PEMUDA
- 250 ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN dan ANGKUTAN
- 260 ORGANISASI WANITA
- 270 PEMILIHAN UMUM
- 280 PENGUCAPAN SUMPAH JANJI MPR, DPR, DPD

300 KEAMANAN KETERTIBAN

- 310 PERTANAHAN
- 320 KEMILITERAN
- 330 KEAMANAN
- 340 PERTANAHAN SIPIL
- 350 KEJAHATAN
- 360 BENCANA
- 370 KECELAKAAN/SAR
- 380 -
- 390 -

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

- 410 PEMBANGUNAN DESA
- 420 PENDIDIKAN
- 430 KEBUDAYAAN

440 KESEHATAN
450 AGAMA
460 SOSIAL
470 KEPENDUDUKAN
480 MEDIA MASSA
490 PENGADUAN MASYARAKAT

500 PEREKONOMIAN

510 PERDAGANGAN
520 PERTANIAN
530 PERINDUSTRIAN
540 PERTAMBANGAN/KESAMUDRAAN
550 PERHUBUNGAN
560 TENAGA KERJA
570 PERMODALAN
580 PERBANKAN/MONETER
590 AGRARIA

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

610 PENGAIRAN
620 JALAN
630 JEMBATAN
640 BANGUNAN
650 TATA KOTA
660 TATA LINGKUNGAN
670 KETENAGAAN
680 PERALATAN
690 AIR MINUM

700 BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN

710 BIDANG KEPEREMINTAHAN
720 BIDANG POLITIK
730 BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN
740 BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
750 BIDANG PEREKONOMIAN
760 BIDANG PEKERJAAN UMUM
770 -
780 BIDANG KEPEGAWAIAN
790 BIDANG KEUANGAN

800 KEPEGAWAIAN

810 PENGADAAN
820 MUTASI
830 KEDUDUKAN
840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI
850 CUTI Meliputi Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Hamil, Cuti Naik Haji, Cuti Diluar Tanggungan Negara dan Cuti Alasan Lain.
860 PENILAIAN
870 TATA USAHA KEPEGAWAIAN

880 PEMBERHENTIAN PEGAWAI

890 PENDIDIKAN PEGAWAI

900 KEUANGAN

910 ANGGARAN

920 OTORISASI/SKO

930 VERIFIKASI

940 PEMBUKUAN

950 PERBENDAHARAAN

960 PEMBINAAN KEBENDAHARAAN

970 PENDAPATAN

980 -

990 BENDAHARAWAN

C. SUB-SUB MASALAH

U M U M

000 UMUM

000 UMUM

001 Lambang

.1 Garuda

.2 Bendera Kebangsaan

.3 Lagu Kebangsaan

.4 Daerah

.41 Provinsi

.42 Kabupaten/Kota

002 Tanda Kehormatan/Penghargaan untuk pegawai

.1 Bintang

.2 Satyalencana

.3 Samkarya Nugraha

.4 Monumen

.5 Penghargaan Secara Adat

.6 Penghargaan lainnya

003 Hari Raya/Besar

.1 Nasional 17 Agustus, Hari Pahlawan, dsb

.2 Hari Raya Keagamaan

.3 Hari Ulang Tahun

.4 Hari-hari Besar Internasional

004 Ucapan

.1 Ucapan Terima Kasih

.2 Ucapan Selamat

.3 Ucapan Belasungkawa

.4 Ucapan Lainnya

005 Undangan

006 Tanda Jabatan

.1 Pamong Praja

.2 Tanda Pengenal

.3 Pejabat Lainnya

007 -

008 -

009 -

010 URUSAN DALAM

011 Gedung Kantor/Termaksud Instalasi Prasaranan Fisik Pamong/
Kantor Dinas

- 012 Rumah Dinas
 - .1 Tanah untuk Rumah Dinas
 - .2 Perabot Rumah Dinas
 - .3 Rumah Dinas Golongan 1
 - .4 Rumah Dinas Golongan 2
 - .5 Rumah Dinas Golongan 3
 - .6 Rumah / Bangunan Lainnya
 - .7 Rumah Pejabat Negara
- 013 Mess/ *Guest House/ Gedung Serbaguna*
- 014 Rumah Susun/Apartemen
- 015 Penerangan Listrik/Jasa Listrik
- 016 Telepone/Faximile/Internet
- 017 Keamanan/Ketertiban Kantor
- 018 Kebersihan Kantor
- 019 Protokol
 - .1 Upacara Bendera
 - .2 Tata Tempat
 - .21 Pemasangan Gambar Presiden/Wakil Presiden
 - .22 Gubernur/Wakil Gubernur
 - .3 Audiensi/Menghadap Pimpinan
 - .4 Alamat-alamat Kantor dan Pejabat
 - .5 Bandir/Umbul-Umbul/Spanduk
- 020 Peralatan
 - .1 Penawaran
- 021 Alat Tulis
- 022 Mesin Kantor
- 023 Perabot Kantor
- 024 Alat Angkutan
- 025 Pakaian Dinas
- 026 Senjata
- 027 Pengadaan
- 028 Inventaris
- 029 Perangkat Elektronik
- 030 KEKAYAAN DAERAH
- 031 Sumber Daya Alam
- 032 Asset Daerah
- 033 Bukti-bukti Kepemilikan
- 034 -
- 035 -
- 036 -
- 040 PERPUSTAKAAN DOKUMENTASI/KEARSIPAN/SANDI
- 041 Perpustakaan
 - .1 Jenis-jenis Perpustakaan
 - .11 Perpustakaan Umum Khusus
 - .12 Perpustakaan Khusus
 - .13 Perpustakaan Perguruan Tinggi
 - .14 Perpustakaan Sekolah
 - .15 Perpustakaan Keliling
 - .16 Perpustakaan Desa
 - .17 Perpustakaan Lembaga-lembaga Keagamaan
 - .2 Deposit Karya Cetak dan Bahan Pustaka
 - .21 Analisis Kebutuhan Bahan Pustaka
 - .22 Pengadaan
 - .23 Penyimpanan
 - .24 Penyusunan Bibliografi
 - .25 Inventarisasi Koleksi

- .3 Pengolahan Bahan Pustaka
 - .31 Penyusunan Katalog/Klasifikasi Buku Induk
 - .32 Buku Inventarisasi dan Registrasi
 - .33 Katalog Induk Daerah
 - .34 Daftar Tambahan Koleksi
 - .35 Statistik Koleksi
 - .36 Verifikasi Data Bibliografi
- .4 Pelayanan
 - .41 Keanggotaan
 - .42 Peminjaman
 - .43 Pengembalian Koleksi
 - .44 Tata Tertib
 - .45 Statistik Anggota
- .5 Pelestarian Bahan Pustaka
 - .51 Pemeliharaan/Pengendalian
 - .52 Pengamanan
 - .53 Restorasi
 - .54 Reprografi
 - .55 Fumigasi
- .6 Otomasi
 - .61 Alih Media

042 Dokumentasi

043 -

044 -

045 Kearsipan

- .1 Pola Klasifikasi
- .2 Penataan Berkas
- .3 Penyusunan Arsip
 - .31 Jadwal Retensi Arsip (JRA)
 - .32 Pemindahan Arsip
 - .33 Penilaian Arsip
 - .34 Pemusnahan Arsip
 - .35 Penyerahan Arsip
 - .36 Berita Acara Penyusutan Arsip
 - .37 Daftar Pencarian Arsip
- .4 Pembinaan Kearsipan
 - .41 Bimbingan Teknis
 - .42 Pelatihan
 - .43 Pembinaan Kelembagaan
 - .44 Pengkajian Sistem Kearsipan
 - .45 Monitoring Dan Evaluasi
 - .46 Organisasi Profesi Kearsipan
- .5 Pemeliharaan/Perawatan Arsip
- .6 Pengawetan/Fumigasi
- .7 Pelayanan
 - .71 Transliterasi
 - .72 Terjemah
 - .73 Penerbitan Naskah sumber
 - .74 Kunjungan
- .8 Otomasi Kearsipan
 - .81 Jaringan Informasi Kearsipan

046 Sandi

047 Website

048 Pengelolaan Data

049 Jaringan Komunikasi Data

- 050 PERENCANAAN
 - .1 Repilita/8 Sukses
 - .11 Pelita Daerah
 - .12 Bantuan Pembangunan Daerah
 - .13 Bappeda
- 051 Proyek Bidang Pemerintah, Klasifikasi Disini:
Proyek Prasarana Fisik Pemerintah, Tambahan Perincian 100 Pada
051 Contoh : Proyek Kependaraan 053.311
- 052 Bidang Politik
- 053 Bidang Keamanan dan Ketertiban Tambahan Perincian 300 pada 053
Contoh : Proyek Ketataprajaan 053.311
- 054 Bidang Kesejahteraan Rakyat Tambahan Perincian 400 pada 054
Contoh : Proyek Resettlement Desa 054.671
- 055 Bidang Perekonomian Tambahan Perincian 500 Pada 055 Contoh :
Proyek Pasar 055.112
- 056 Bidang Pekerjaan Umum Tambahan Perincian 600 pada 056 Contoh :
Proyek Jembatan 056.3
- 057 Bidang Pengawasan
- 058 Bidang Kepegawaian
- 059 Bidang Keuangan
- 060 ORGANISASI/KETATALAKSANAAN
 - .1 Program Kerja
- 061 Organisasi Instansi Pemerintah (Struktur Organisasi)
 - .1 Susunan dan Tata Kerja
 - .2 Tata Tertib Kantor, Jam Kerja di Bulan Puasa
- 062 Organisasi Badan Non Pemerintah
- 063 Organisasi Badan Internasional
- 064 Organisasi Semi Pemerintah, BKS-AKSI
- 065 Ketatalaksanaan/Tata Naskah/Sistem
- 066 Stempel Dinas
- 067 Pelayanan Umum/Pelayanan Publik/Analisis
- 068 Komputerisasi/Siskomdagri
- 069 Standar Pelayanan Minimal
- 070 PENELITIAN
- 071 Riset
- 072 Survey
- 073 Kajian
- 074 Kerjasama Penelitian Dengan Perguruan Tinggi
- 075 Kementerian Lainnya
- 076 Non Kementrian
- 077 Provinsi
- 078 Kabupaten/Kota
- 079 Kecamatan/Desa
- 080 KONFERENSI/RAPAT/SEMINAR
- 081 Gubernur
- 082 Bupati/Walikota
- 083 Komponen, Eselon Lainnya
- 084 Instansi Lainnya
- 085 Internasional di Dalam Negeri
- 086 Internasional di Luar Negeri
- 087 -
- 088 -
- 089 -

- 090 PERJALANAN DINAS
- 091 Perjalanan Presiden/Wakil Presiden ke Daerah
- 092 Perjalanan Menteri ke Daerah
- 093 Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon 1)
- 094 Perjalanan Pegawai termasuk Pemanggilan Pegawai
- 095 Perjalanan Tamu Asing ke Daerah
- 096 Perjalanan Presiden/Wakil Presiden ke Luar Daerah
- 097 Perjalanan Menteri ke Luar Negeri
- 098 Perjalanan Pejabat Tinggi Negara ke Luar Negeri
- 099 Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri

PEMERINTAHAN

100 PEMERINTAHAN

- 100 Pemerintahan Umum
- 101 Meliputi : Pencalonan, pengangkatan, pelatihan, sumpah, dan serah jabatan
- 102 GDN
- 103 -
- 104 -
- 105 -

- 110 PEMERINTAH PUSAT
- 111 Presiden
 - Meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Pelatihan, sumpah, dan serah jabatan
 - .1 Pertanggung jawaban wakil presiden kepada MPR
 - .2 Amanat Wakil Presiden/Amanat Kenegaraan/Pidato
- 112 Wakil Presiden
 - Meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Pelatihan, sumpah, dan serah jabatan
 - .1 Pertanggung jawaban wakil presiden kepada MPR
 - .2 Amanat Wakil Presiden/Amanat Kenegaraan/Pidato
- 113 Susunan Kabinet
 - .1 Reshuffle
 - .2 Penunjukan Menteri Ad Interim
 - .3 Sidang Kabinet.
- 114 Kementrian Dalam Negeri
 - .1 Amanat Menteri Dalam Negeri/Sambutan
- 115 Kementrian Lainnya
- 116 Lembaga Tinggi Negara
- 117 Lembaga Non Apartemen
- 118 Otonomi/Desentralisasi/Dekonsentrasi
- 119 Kerjasama antar Kementerian

- 120 PEMERINTAH PROVINSI
 - .1 Laporan Daerah
 - .11 Monografi Kode Wilayah
 - .2 Koordinasi
 - .3 Instansi Tingkat Provinces
 - .31 Dinas Otonom
 - .32 Instansi Vertikal
 - .33 Kerjasama antar Provinsi/Daerah
- 121 Gubernur tambahan kode wilayah, meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelatihan, Pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya.

- 122 Wakil Gubernur meliputi : tambahkan kode wilayah pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelatihan, Pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya.
- 123 Sekretaris Wilayah Tambahan kode wilayah, meliputi : pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelatihan, Pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya.
- 124 Pembentukan/Pemekaran Wilayah
 - .1 Pembinaan/Perubahan Nama kepada : Daerah, Kota, Benda, Geografis, Gunung, sungai, pulau, selat, batas laut, dan sebagai.
 - .2 Pemekaran Wilayah
 - .3 Forum Koordinasi Lainnya
- 125 Pembentukan/Pemekaran Wilayah
 - .1 Pembinaan/Perubahan Nama kepada : Daerah, Kota, Benda, Geografis, Gunung, sungai, pulau, selat, batas laut, dan sebagai.
 - .2 Pembentukan Wilayah
 - .3 Pemindahan Ibukota
 - .4 Perubahan batas wilayah
 - .5 Pemekaraan Wilayah
- 126 Pembagian Wilayah
- 127 Penyerahan Urusan
- 128 Swapraja/Penataan Wilayan/Daerah
- 129 -
- 130 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
- 131 Bupati/Walikota, Tambahan Kode Wilayah, Meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelatihan, Pemberhentian, serah Terima jabatan, dsb.
- 132 Wakil Bupati/Walikota Tambahan Kode Wilayah, Meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelatihan, Pemberhentian, serah Terima jabatan
- 133 Sekretaris Daerah kabupaten/Kota, Tambahan Kode Wilayah, Meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelatihan, Pemberhentian, serah Terima jabatan.
- 134 Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah
 - .1 Muspida
 - .2 Forum PAN (Panitia Anggaran Daerah)
 - .3 Forum Koordinasi Lainnya
 - .4 Kerjasama antar Kabupaten/Kota
- 135 Pembentukan/pemekaran Wilayah
 - .1 Pemindahan Ibukota
 - .2 Pembentukan Wilayah Pembantu Bupati/Walikota
 - .3 Pembagian wilayah Kabupaten/Kota
 - .4 Perubahan Batas Wilayah
 - .5 Pemekaran Wilayah
 - .6 Permasalahan Batas Wilayah
 - .7 Pembentukan Ibukota/Kota
 - .8 Pemberian dan Penggantian Nama Kabupaten/Kota, Daerah, jalan
- 136 Pembagian Wilayah
- 137 Penyerahan Urusan
- 138 Pemerintah Wilayah Kecamatan
 - .1 Sambutan/Pengarahan/Amanat
 - .2 Pembentukan Kecamatan
 - .3 Pemekaran Kecamatan
 - .4 Perluasan/Perubahan Batas wilayah kecamatan
 - .5 Pembentukan Perwakilan Kecamatan/Kemantrean
 - .6 -
 - .7 -

- 139 -
- 140 PEMERINTAH DESA/KELURAHAN
- 141 Pamong Desa, Meliputi : Pencalonan, Pemilihan, Meninggal, Pengangkatan, Pemberhentian, dan sebagainya.
- 142 Penghasilan Pamong Desa
- 143 Kekayaan Desa
- 144 Dewan Tingkat Desa, Dewan Marga, Rembung Desa
- 145 Administrasi Desa
- 146 Kewilayahan
- .1 Pembentukan Desa/Kelurahan
 - .2 Pemekaran Desa/Kelurahan
 - .3 Perubahan Batas Wilayah/Perluasan desa/Kelurahan
 - .4 Perubahan Nama Desa/Kelurahan
 - .5 Kerjasama antara Desa/Kelurahan
- 147 Lembaga-Lembaga Tingkat Desa
- Jangan Klasifikasikan disini, lihat 410 dengan perinciannya
- 148 Perangkat Kelurahan
- .1 Kepala Kelurahan
 - .2 Sekretaris Kelurahan
 - .3 Staf Kelurahan
- 149 Dewan Kelurahan
- .1 Rukun tetangga
 - .2 Rukun warga
 - .3 Rukun Kampung
- 150 LEGISLATIF MPR/DPR/DPD
- 151 Keanggotaan MPR
- .1 Pencalonan
 - .2 Pemberhentian
 - .3 Recall
 - .4 Pelanggaran
- 152 Persidangan
- 153 Kesejahteraan
- .1 Keuangan
 - .2 Penghargaan
- 154 Hak
- 155 Keanggotaan DPR Pencalonan, Pengangkatan
- 156 Persidangan Sidang Pleno, Dengar Pendapat/Rapat Komisi, Reses
- 157 Kesejahteraan
- .1 Keuangan
 - .2 Penghargaan
- 158 Jawaban Pemerintah
- 159 Hak
- 160 DPRD PROVINSI TAMBAHAN KODE WILAYAH
- 161 Keanggotaan
- .1 Pencalonan
 - .2 Pengangkatan
 - .3 Pemberhentian
 - .4 Recall
 - .5 Pelanggaran
- 162 Persidangan
- .1 Reses
- 163 Kesejahteraan
- .1 Keuangan
 - .2 Penghargaan
- 164 Hak

165	Sekretaris DPRD Provinsi
166	-
167	-
168	-
169	-
170	DPRD KABUPATEN TAMBAHAN KODE WILAYAH
171	Keanggotaan
	.1 Pencalonan
	.2 Pengangkatan
	.3 Pemberhentiaan
	.4 Recall
	.5 Pelanggaran
172	Persidangan
	.1 Reses
173	Kesejahteraan
	.1 Keuangan
	.2 Penghargaan
174	Hak
175	Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota
176	-
177	-
178	-
179	-
180	Hukum
	.1 Konstitusi
	.11 Dasar Hukum
	.12 Undang-undang Dasar
	.2 GBHN
	.3 Amnesti, Abolisi dan grasi
181	Perdata
	.1 Tanah
	.2 Rumah
	.3 Utang/Piutang
	.31 Gadai
	.32 Hipotik
	.4 Notariat
182	Pidana
	.1 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
183	Peradilan
	Peradilan Agama Islam 451.6
	Peradilan Perkara Tanah 593.71
	.1 Bantuan Hukum
184	Hukum Internasional
185	Imigrasi
	.1 Visa
	.2 Paspor
	.3 Exit
	.4 Reentry
	.5 Lintas Batas/Batas Antar Negara
186	Kepenjaraan
187	Kejaksaan
188	Peraturan Perundang-undangan
	.1 Tap MPR
	.2 Undang-Undang Dasar
	.3 Peraturan
	.31 Peraturan Pemerintah

	.32 Peraturan Menteri
	.33 Peraturan Lembaga Non Departemen
	.34 Peraturan Daerah
	.341 Peraturan Provinsi
	.342 Peraturan Kabupaten/Kota
	.4 Keputusan
	.41 Presiden
	.42 Menteri
	.43 Lembaga Non Departemen
	.44 Gubernur
	.45 Bupati/Walikota
	.5 Instruksi
	.51 Presiden
	.52 Menteri
	.53 Lembaga Non Departemen
	.54 Gubernur
	.55 Bupati/Walikota
	.6 Surat Edaran
189	Hukum Adat
	.1 Tokoh Adat/Masyarakat
190	HUBUNGAN LUAR NEGERI
191	Perwakilan Asing
192	Tamu Negara
193	Kerjasama dengan Negara Asing
	.1 ASEAN
	.2 Bantuan Luar Negeri/Hibah
194	Perwakilan RI di Luar Negeri/Hibah
195	PBB
196	Laporan Luar Negeri
197	Hutang Luar Negeri PHLN/LOAN
198	-
199	-

POLITIK

200	POLITIK
201	Kebijaksanaan Umum
202	Orde Baru
203	Reformasi
204	-
205	-
206	-
210	KEPARTAIAN
211	Lambang Partai
212	Kartu Tanda Anggota
213	Bantuan keuangan parpol
214	-
215	-
216	-
220	ORGANISASI KEMASYARAKATAN
221	Berdasarkan Perjuangan
	.1 Perintis Kemerdekaan
	.2 Angkatan 1945
	.3 Veteran
222	Berdasarkan Kekaryaan

- .1 PEPABRI
- .2 Wredautama
- 223 Berdasarkan kerohanian
- 224 Lembaga Adat
- 225 Lembaga Swadaya Masyarakat
- 226 -
- 227 Organisasi Berdasarkan Kerohanian Budha
- 228 -
- 229 -
- 230 ORGANISASI PROFESI dan FUNGSIONAL
- 231 Ikatan Dokter Indonesia
- 232 Persatuan Guru Indonesia
- 233 Persatuan Sarjana Hukum Indonesia
- 234 Persatuan Advokat Indonesia
- 235 Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
- 236 Korp Pegawai Republik Indonesia
- 237 Persatuan Wartawan Indonesia
- 238 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
- 239 Organisasi Profesi dan Fungsional Lainnya
- 240 ORGANISASI PEMUDA
- 241 Komite Nasional Pemuda Indonesia
- 242 Organisasi Mahasiswa
- 243 Organisasi Pelajar
- 244 Gerakan Pemuda Ansor
- 245 Gerakan Pemuda Islam Indonesia
- 246 Gerakan Pemuda Marhaenis
- 247 -
- 248 -
- 250 ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN DAN ANGKUTAN
- 251 Federasi Buruh Seluruh Indonesia
- 252 Organisasi Buruh Indonesia
- 253 Himpunan Kerukunan Tani
- 254 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
- 255 Keluarga Sopir Proporsional Indonesia
- 256 -
- 257 -
- 258 -
- 260 ORGANISASI WANITA
- 261 Dharma Wanita
- 262 Persatuan Wanita Indonesia
- 263 Pemberdayaan Perempuan (Wanita)
- 264 Kongres Wanita
- 265 -
- 266 -
- 267 -
- 268 -
- 269 -
- 270 PEMILIHAN UMUM
- 271 Pencalonan
- 272 Nomor urut partai/Tanda Gambar
- 273 Kampanye
- 274 Petugas Pemilu
- 275 Pemilih/Daftar Pemilih

- 276 Sarana
 - .1 TPS
 - .2 Kendaraan
 - .3 Surat Suara
 - .4 Kotak Suara
 - .5 Dana
- 277 Pemungutan Suara/Perhitungan Suara
- 278 Penetapan Hasil Pemilu
- 279 Penetapan Perolehan Jumlah Kursi dan Calon Terpilih
- 280 Pengucapan Sumpah Janji MPR, DPR, DPD
- 281 -
- 282 -
- 283 -
- 284 -

KEAMANAN DAN KETERTIBAN

- 300 Keamanan dan Ketertiban**
- 301 Keamanan
- 302 Ketertiban
- 303 -
- 310 PERTAHANAN
- 311 Darat
- 312 Laut
- 313 Udara
- 314 Perbatasan
- 315 -
- 316 -
- 317 -
- 320 KEMILITERAN
- 321 Latihan Militer
- 322 Wajib Militer
- 323 Operasi Militer
- 324 Kekaryaan TNI Pejabat Sipil dari TNI
 - .1 TMD
- 325 -
- 326 -
- 327 -
- 328 -
- 330 KEAMANAN
- 331 Kepolisian
 - .1 Polisi Pamong Praja
 - .2 Kamra
 - .3 Kamling
 - .4 Jaga Wana
- 332 Huru-hara/Demonstrasi
- 333 Senjata Api/Tajam
- 334 Bahan Peledak
- 335 Perjudian
- 336 Surat-surat Kaleng
- 337 Pengaduan
- 338 Himbauan/Larangan
- 339 Teroris
- 340 PERTAHANAN SIPIL

341	Perlindungan Sipil
342	-
343	-
344	-
350	KEJAHATAN
351	Makar/Pemberontak
352	Pembunuhan
353	Penganiayaan, Pencurian
354	Subversi/Penyelundupan/Narkotika
355	Pemalsuan
356	Korupsi/Penyelewengan/Penyalahgunaan Jabatan/KKN
357	Pemeriksaan/Perbuatan Cabul
358	Kenakalan
359	Kejahatan Lainnya
360	Bencana
361	Gunung Berapi/Gempa
362	Banjir/Tanah Longsor
363	Angin Topan
364	Kebakaran
	.1 Pemadam Kebakaran
365	Kekeringan
366	Tsunami
367	-
368	-
370	KECELAKAAN
371	Darat
372	Udara
373	Laut
374	Sungai/Danau
375	-
376	-
377	-
380	-
381	-
382	-
383	-
390	-
391	-
392	-
393	-

KESEJAHTERAAN RAKYAT

400	KESEJAHTERAAN RAKYAT
401	Keluarga Miskin
402	PNPM Mandiri Perdesaan
403	-
404	-
410	PEMBANGUNAN DESA
411	Pembinaan Usaha Gotong royong
	.1 Swadaya Gotong Royong
	.11 Penataan Gotong Royong
	.12 Gotong Royong Dinamis
	.13 Gotong Royong Statis

- .14 Pungutan
- .2 Lembaga Sosial Desa (LSD)
 - .21 Pembinaan
 - .22 Klasifikasi
 - .23 Proyek
 - .24 Musyawarah
- .3 Latihan Kerja Masyarakat
 - .31 Kader Masyarakat
 - .32 Kuliah Kerja Nyata (KKN)
 - .33 Pusat Latihan
 - .34 Kursus-kursus
 - .35 Kurikulum/Sylabus
 - .36 Keterampilan
 - .37 Pramuka
- .4 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 - .41 Program
 - .42 Pembinaan Organisasi
 - .43 Kegiatan
- .5 Penyuluhan
 - .51 Publikasi
 - .52 Peragaan
 - .53 Sosial Drama
 - .54 Siaran Perdesaan
 - .55 Penyuluhan Lapangan
- .6 Kelembagaan Desa
 - .61 Kelompok Tani
 - .62 Rukun Tani
 - .63 Subak
 - .64 Dharma Tirta
- 412 Perekonomian Desa
 - .1 Produk desa
 - .11 Pengolahan
 - .12 Pemasaran
 - .2 Keuangan Desa
 - .21 Perkreditan Desa
 - .22 Inventarisasi Data
 - .23 Perkembangan/Pelaksanaan
 - .24 Bantuan/Stimulasi
 - .25 Petunjuk/Pembinaan Pelaksanaan
 - .3 Koperasi Desa
 - .31 Badan Usaha Unit Desa (BUUD)
 - .32 Koperasi Usaha Desa
 - .4 Penataan Bantuan Pembangunan Desa
 - .41 Jumlah Desa yang diberi bantuan
 - .42 Pengarahan
 - .43 Pusat
 - .44 Daerah
 - .5 Alokasi Bantuan Pembangunan Desa
 - .51 Pusat
 - .52 Daerah
 - .6 Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa
 - .61 Bantuan Langsung
 - .62 Bantuan Keserasian
 - .63 Bantuan Juara Lomba Desa
- 413 Prasarana Desa
 - .1 Prasarana Desa
 - .11 Pembinaan

- .12 Bimbingan Teknis
- .2 Pemukiman Kembali Penduduk
 - .21 Lokasi
 - .22 Diskusi
 - .23 Pelaksanaan
- .3 Masyarakat Pradesa
 - .31 Pembina
 - .32 Penyuluh
- .4 Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa
 - .41 Rumah Sehat
 - .42 Proyek Perintis
 - .43 Pelaksanaan
 - .44 Pengembangan
 - .45 Perbaikan Kampung
- 414 Pengembangan Desa
 - .1 Tingkat Perkembangan Desa
 - .11 Jumlah Desa
 - .12 Pemekaran Desa
 - .13 Pembentukan Desa Baru
 - .14 Evaluasi
 - .15 Bagan
 - .2 Unit Desa Kerja Pembangunan (UDKP)
 - .21 Penyuluhan Program
 - .22 Lokasi UDKP
 - .23 Pelaksanaan
 - .14 Bimbingan/Pembinaan
 - .15 Evaluasi
 - .3 Tata Desa
 - .31 Inventaris
 - .32 Penyusunan Pola Tata Desa
 - .33 Aplikasi Tata Desa
 - .34 Pemetaan
 - .35 Pedoman Pelaksanaan
 - .36 Evaluasi
 - .4 Perlombaan Desa
 - .41 Pedoman
 - .42 Penilaian
 - .43 Kejuaraan
 - .44 Piagam
- 415 Koordinasi
 - .1 Sektor Khusus
 - .2 Rapat Koordinasi Horizontal (RKH)
 - .3 Tim Koordinasi Pusat (TKP)
 - .4 Kerjasama
 - .41 Luar Negeri (UNICEF)
 - .42 Perguruan Tinggi
 - .43 Kementrian/Lembaga Non Kementrian
- 416 -
- 417 -
- 418 -
- 419 -
- 420 PENDIDIKAN
 - .1 Pendidikan Khusus Klasifikasi Disini Pendidikan Putra/I Irja
- 421 Sekolah
 - .1 Pra Sekolah
 - .2 Sekolah Dasar

- .3 Sekolah Menengah
- .4 Sekolah Tinggi
- .5 Sekolah Kejuruan
- .6 Kegiatan Sekolah, Dies Natalis Lustrum
- .7 Kegiatan Pelajar
 - .71 Reuni Darmawisata
 - .72 Pelajar Teladan
 - .73 Resimen Mahasiswa
- .8 Sekolah pendidik luar biasa
- .9 Pendidikan Luar Sekolah/Pemberantasan Buta Huruf
- 422 Administrasi Sekolah
 - .1 Persyaratan Masuk Sekolah, testing, ujian, pendaftaran, mapras, Perpeloncoan
 - .2 Tahun Pelajaran
 - .3 Hari Libur
 - .4 Uang Sekolah, Klasifikasi Disini SPP
 - .5 Beasiswa
- 423 Metode Belajar
 - .1 Kuliah
 - .2 Ceramah, Simposium
 - .3 Diskusi
 - .4 Kuliah Lapangan, Widyawisata, KKN, Studi Tur
 - .5 Kurikulum
 - .6 Karya Tulis
 - .7 Ujian
- 424 Tenaga Pengajar, Guru, Dosen, Dekan, Rektor.
Klasifikasi Disini : Guru Teladan
- 425 Sarana Pendidikan
 - .1 Gedung
 - .11 Gedung Sekolah
 - .12 Kampus
 - .13 Pusat Kegiatan Mahasiswa
 - .2 Buku
 - .3 Perlengkapan Mahasiswa
- 426 Keolahragaan
 - .1 Cabang Olahraga
 - .2 Sarana
 - .21 Gedung Olahraga
 - .22 Stadion
 - .23 Lapangan
 - .24 Kolam Renam
 - .3 Pesta Olahraga, Klasifikasi Disini PON, Porsade, Olimpiade, dsb
 - .4 Koni
- 427 Kepramukaan Meliputi : Organisasi dan Kegiatan Remaja
Klasifikasi Disini : Gelanggang Remaja
- 428 Pramukaan
- 429 Pendidikan Kedinasan untuk DEpdagri, lihat 890
- 430 KEBUDAYAAN
- 431 Kesenian
 - .1 Cabang Kesenian
 - .2 Sarana
 - .21 Gedung Kesenian
- 432 Kepurbakalaan
 - .1 Museum
 - .2 Peninggalan Kuno
 - .21 Candi Termasuk Pemugaran

.22 Benda

- 433 Sejarah
- 434 Bahasa
- 435 Usaha Pertunjukan, Hiburan, Kesenangan
- 436 Kepercayaan
- 437 -
- 438 -
- 439 -
- 440 KESEHATAN
- 441 Pembinaan Kesehatan
 - .1 Gizi
 - .2 Mata
 - .3 Jiwa
 - .4 Kanker
 - .5 Usaha Kegiatan Sekolah (UKS)
 - .6 Perawatan
 - .7 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM)
 - .8 Pekan Imunisasi Nasional
- 442 Obat-obatan
 - .1 Pengadaan
 - .2 Penyimpanan
- 443 Penyakit Menular
 - .1 Pencegahan
 - .2 Pemberantasan Dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P2ML)
 - .21 Kusta
 - .22 Kelamin
 - .23 Frambosia
 - .24 TBC/AIDS/HIV
 - .3 Edidemiologi dan Karantina (Efidka)
 - .31 Kholera
 - .32 Imunisasi
 - .33 Survailense
 - .34 Rabies (Anjing Gila) Antraks
 - .4 Pemberantasan & Pencegahan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B)
 - .41 Malaria
 - .42 Dengue Faemorrhagie Fever (Deman BerdarahHDF)
 - .43 Filaria
 - .44 Serangga
 - 5. Hygiene Sanitasi
 - .51 Tempat-Tempat Pembuatan dan Penjualan Makanan dan Minuman (TPPMM)
 - .52 Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga (Samijaga)
 - .53 Pestisida
- 444 Gizi
 - .1 Kekurangan Makanan Bahaya Kelaparan, Busung Lapar
 - .2 Keracunan Makanan
 - .3 Menu Makanan Rakyat
 - .4 Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD)
 - .5 Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT.AS)
- 445 Rumah Sakit, Balai Kesehatan, PUSKESMAS, PUSKEMAS Keliling, Poliklinik

- 446 Tenaga Medis
- 447 -
- 448 Pengobatan Tradisional
 - .1 Pijat
 - .2 Tusuk Jarum
 - .3 Jamu Tradisional
 - .4 Dukun/Paranormal
- 450 AGAMA
- 451 Islam
 - .1 Peribadatan
 - .11 Sholat
 - .12 Zakat Fitrah
 - .13 Puasa
 - .14 MTQ
 - .2 Rumah Ibadah
 - .3 Tokoh Agama
 - .4 Pendidikan
 - .41 Tinggi
 - .42 Menengah
 - .43 Dasar
 - .44 Pondok Pesantren
 - .45 Gedung Sekolah
 - .46 Tenaga Pengajar
 - .47 Buku
 - .48 Dakwah
 - .49 Organisasi/Lembaga Pendidikan
 - .5 Harta Agama Wakaf, Baitulmal, dsb
 - .6 Peradilan
 - .7 Organisasi Keagamaan Bukan Politik Majelis Ulama
 - .8 Mazhab
- 452 Protestan
 - .1 Peribadatan
 - .2 Rumah Ibadah
 - .3 Tokoh Agama, Rohaniawan, Pendeta, Domine
 - .4 Mazhab
 - .5 Organisasi Gerejani
- 453 Katolik
 - .1 Peribadatan
 - .2 Rumah Ibadah
 - .3 Tokoh Agama : Rokhaniawan
 - .4 Mazhab
 - .5 Organisasi Keagamaan
- 454 Hindu
 - .1 Peribadatan
 - .2 Rumah Ibadah
 - .3 Tokoh Agama, Rokhaniawan
 - .4 Mazhab
 - .5 Organisasi Keagamaan
- 455 Budha
 - .1 Peribadatan
 - .2 Rumah Ibadah
 - .3 Tokoh Agama : Rokhaniawan
 - .4 Mazhab
 - .5 Organisasi Keagamaan
- 456 Urusan Haji
 - .1 ONH
 - .2 Manasik

- 457 -
458 -
459 -
- 460 SOSIAL
- 461 Rehabilitasi Penderita Cacat
- .1 Cacat Mata
 - .2 Cacat Tubuh
 - .3 Cacat Mental
 - .4 Bisu/Tuli
- 462 Tuna Sosial
- .1 Gelandangan
 - .2 Pengemis
 - .3 Tuna Susila
 - .4 Anak Nakal
- 463 Kesejahteraan Anak/Keluarga
- .1 Anak Putus Sekolah
 - .2 Ibu Teladan
 - .3 Anak Asuh
- 464 Pembinaan Pahlawan
- .1 Pahlawan meliputi Peghargaan kepada Pahlawan, Tunjangan kepada Pahlawan dan Jandanya
 - .2 Perintis Kemerdekaan meliputi Pembinaan, Penghargaan dan Tunjangan kepada Perintis
 - .3 Cacat Veteran
- 465 Kesejahteraan Sosial
- .1 Lanjut Usia
 - .2 Korban Kekacauan, Pengungsi, Repatriasi
- 466 Sumbangan Sosial
- .1 Korban Bencana
 - .2 Pencarian Dana Untuk Sumbangan meliputi : Penyelenggaraan Undian, Ketangkasan, Bazar dan sebagainya
 - .3 Panti Asuhan
 - .4 Panti Jompo
- 467 Bimbingan Sosial
- .1 Masyarakat Suku Terasing Meliputi : Bimbingan, Pendidikan, kesehatan, pemukiman.
- 468 PMI
- 469 Makam
- .1 Umum
 - .2 Pahlawan Meliputi : Penghargaan kepala Pahlawan, Tunjangan kepada Pahlawan dan Jandanya.
 - .3 Khusus Keluarga Raja
 - .4 Krematorium
- 470 KEPENDUDUKAN
- 471 Pendaftaran Pendudukan
- .1 Identitas Penduduk
 - .11 Biodata
 - .12 Nomor Induk Kependudukan
 - .13 Kartu Tanda Penduduk
 - .14 Kartu Keluarga
 - .15 Advokasi Indentitas Penduduk
 - .2 Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah Indonesia
 - .21 Perpindahan Penduduk WNI
 - .22 Perpindahan Penduduk WNA Dalam Wilayah Indonesia
 - .23 Perpindahan Penduduk WNA dan WNI Tinggal Sementara
 - .24 Daerah Terbelakan

- .25 Bedol Desa
- .3 Perpindahan Penduduk Antar Negara
- .31 Penduduk Indonesia Ke Luar Negeri
- .32 Orang Asing Tinggal Semester
- .33 Orang Asing Tinggal Tetap
- .34 Perpindahan Penduduk Antar Negara di Wilayah Pembatasan Antar Negara (Pelintas Batas Tradisional)
- .4 Pendaftaran Pengungsi dan Penduduk Rentan
- .41 Akibat Bencana Alam
- .42 Akibat Kerusuhan Sosial
- .43 Pendaftaran Penduduk Daerah Terbelakang
- .44 Pendaftaran Penduduk Rentan
- 472 Pencatatan Sipil
 - .1 Kelahiran, Kematian dan advokasi
 - .11 Kelahiran
 - .12 Kematian
 - .13 Advokasi Kelahiran Dan Kematian
 - .2 Perkawinan, Perceraian Dan Advokasi
 - .21 Perkawinan Agama Islam
 - .22 Perkawinan Agama Non Islam
 - .23 Perceraian Agama Islam
 - .24 Perceraian Agama Non Islam
 - .25 Advokasi Perkawinan Dan Perceraian
 - .3 Perangkatan, Pengakuan, dan Pengesahan Anak Serta Perubahan dan Pembatalan Akta dan Advokasi Pengangkatan Anak
 - .31 Perangkatan Anak
 - .32 Pengakuan Anak
 - .33 Pengesahan Anak
 - .34 Perubahan Anak
 - .35 Pembatalan Anak
 - .36 Advokasi Pengurusan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta perubahan dan Pembatalan Akta
 - .4 Pencatatan Kewarganegaraan
 - .41 Akibat Perkawinan
 - .42 Akibat Kelahiran
 - .43 Non Perkawinan
 - .44 Non Kelahiran
 - .45 Perubahan WNI ke WNA
- 473 Informasi Kependudukan
 - .1 Teknologi Informasi
 - .11 Perangkat Keras
 - .12 Perangkat Lunak
 - .13 Jaringan Komunikasi Data
 - .2 Kelembagaan Dan Sumber Daya Informasi
 - .21 Daerah Maju
 - .22 Daerah Berkembang
 - .23 Daerah Terbelakang
 - .3 Pengolahan Data Kependudukan
 - .31 Pendaftaran Penduduk
 - .32 Kejadian Vital Penduduk
 - .33 Penduduk Non Register
 - .4 Pelayanan Informasi Kependudukan
 - .41 Media Elektronik
 - .42 Media Cetak
 - .43 Outlet
- 474 Perkembangan Penduduk
 - .1 Pengarahan Kuantitas Penduduk

	.11	Struktur Jumlah	
	.12	Komposisi	
	.13	Fertilitas	
	.14	Kesehatan Reproduksi	
	.15	Morbiditas Penduduk	
	.16	Mortalitas Penduduk	
	.2	Pengembangan Kuantitas Penduduk	
	.21	Anak Dan Remaja	
	.22	Penduduk Usia Produksi	
	.23	Penduduk Lanjut Usia	
	.24	Gender	
	.3	Penataan Persebaran Penduduk	
	.31	Migrasi Antar Wilayah	
	.32	Migrasi Internasional	
	.33	Urbanisasi	
	.34	Sementara	
	.35	Migrasi Non Permanen	
	.4	Perlindungan Pemberdayaan Penduduk	
	.41	Pengembangan Sistem Pelindungan Penduduk	
	.42	Pelayanan Kelembagaan Ekonomi	
	.43	Pelayanan Kelembagaan Sosial Budaya	
	.44	Partisipasi Masyarakat	
	.5	Pengembangan wawasan kependudukan	
	.51	Pendidikan Jalur Sekolah	
	.52	Pendidikan Jalur Luar Sekolah	
	.53	Pendidikan Jalur Masyarakat	
	.54	Pembangunan Berwawasan Kependudukan	
475		Proyeksi dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan	
	.1	Indikator Kependudukan	
	.11	Perumusan Penetapan Dan Pengembangan Indikator Kependudukan	
	.12	Pemanfaatan Indikator Kependudukan	
	.13	Sosialisasi Indikator Kependudukan	
	.2	Proyeksi Kependudukan	
	.21	Penyusunan dan Pengembangan Proyeksi Kependudukan	
	.22	Pemanfaatan Proyeksi Kependudukan	
	.3	Analisis Dampak Kependudukan	
	.31	Penyusunan dan Pengembangan	
	.32	Pemanfaatan Analisis Dampak Kependudukan	
	.4	Penyerasian Kebijakan Lembaga Non Pemerintah	
	.41	Lembaga Internasional	
	.42	Lembaga Masyarakat dan Nirlaba	
	.43	Lembaga Usaha Swasta	
	.5	Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah	
	.51	Lembaga Pemerintah	
	.52	Pemerintah Provinsi dan Kota	
	.53	Pemerintah Kabupaten	
	.6	Analisis	
476		Monitoring	
477		Evaluasi	
478		Dokumentasi	
479		-	
480		MEDIA MASSA	
481		Penerbitan	
	.1	Surat Kabar	
	.2	Majalah	

- .3 Buku
- .4 Penerjemahan
- 482 Radio
 - .1 RRI
 - .11 Siaran Pedesaan Jangan Diklasifikasikan Disini
 - .2 Non RRI
 - .3 Luar Negeri
- 483 Televisi
- 484 Film
- 485 Pers
 - .1 Kewartawanan
 - .2 Wawancara
 - .3 Informasi Nasional
- 486 Grafika
- 487 Penerangan
 - .1 Pameran Non Komersil
- 488 Operasional Room
- 489 Hubungan Masyarakat
- 490 Pengaduan Masyarakat
- 491 -
- 492 -

PEREKONOMIAN

500 Perekonomian

- .1 Dewan Stabilisasi
- 501 Pengadaan Pangan
- 502 Pengadaan Sandang
- 503 Perizinan pada Umumnya untuk Perizinan Suatu Bidang Klasifikasi Masalah
- 504 -
- 505 -
- 506 -
- 510 Perdagangan
 - Klasifikasikan disini : Tata Niaga
 - .1 Promosi Perdagangan
 - .11 Pekan Raya
 - .12 Iklan
 - .13 Pameran Non Komersil
 - .2 Pelelangan
 - .3 Tera
- 511 Pemasaran
 - .1 Sembilan Bahan Pokok, Tambahan Kode Wilayah : Beras, garam, Tanah, Minyak Goreng
 - .2 Pasar
 - .3 Pertokoan, Kaki Lima, Kios
- 512 Ekspor
- 513 Impor
- 514 Perdagangan Antar Pulau
- 515 Perdagangan Luar Negeri
- 516 Pergudangan
- 517 Aneka Usaha Perdagangan
- 518 Koperasi untuk BUUD, KUD Lihat (412.31-412.32)
- 519 -
- 520 Pertanian
 - .1 Program

- .11 Bimas/Inmas Termasuk Kredit
- .12 Penyuluhan
- .2 Produksi
 - .21 Padi/Panen
 - .22 Palawija
 - .23 Jagung
 - .24 Ketela Pohon/Ubi-Ubian
 - .25 Hortikultura
 - .26 Sayuran/Buah-Buahan
 - .27 Tanaman Hias
 - .28 Pembudidayaan Rumput Laut
- .3 Saran Usaha Pertanian
 - .31 Peralatan meliputi : Traktor dan Peralatan Lainnya
 - .32 Pembibitan
 - .33 Pupuk
- .4 Perlindungan Tanaman
 - .41 Penyakit, Penyakit Daun, Penyakit Batang
 - .42 Hama, Serangga, Wereng, Walang Sangit, Tungro Tikus dan sejenisnya
 - .43 Pemberantasan Hama meliputi penyemprotan, Penyiangan, geropyokan, sprayer. penyemprotan, Penyiangan, geropyokan, sprayer, pemberantasan melalui Udara
 - .44 Pestisida
- .5 Tanah Pertanian Pangan
 - .51 Pesawahan
 - .52 Perladangan
 - .53 Kebun
 - .54 Rumpon Ikan Laut
 - .55 KTA/Lahan Kritis
- .6 Pengusaha Petani
- .7 Bina Usaha
 - .71 Pasca Panen
 - .72 Pemasaran Hasil

522 Kehutanan

- .1 Program
 - .11 Hak Pengusahaan Hutan
 - .12 Tata Guna Hutan
 - .13 Perpetaan Hutan
 - .14 Tumpangsari
- .2 Produksi
 - .21 Kayu
 - .22 Non Kayu
- .3 Sarana Usaha Kehutanan
- .4 Penghijauan, Reboisasi
- .5 Kelestarian
 - .51 Cagar Alam, Marga Satwa, Suaka Marga Satwa
 - .52 Berburu meliputi laranagan dan izin berburu
 - .53 Kebun Binatang
 - .54 Konservasi Lahan
- .6 Penyakit/Hama
- .7 Jenis- Jenis Hutan
 - .71 Hutan Hidup
 - .72 Hutan Wisata
 - .73 Hutan Produksi
 - .74 Hutan Lindung

- 523 Perikanan
- .1 Program
 - .11 Penyuluhan
 - .12 Teknologi
 - .2 Produksi
 - .21 Pelelangan
 - .3 Usaha Perikanan
 - .31 Pembibitan
 - .32 Daerah Penangkapan
 - .33 Pertambakan Meliputi : (Tambang Ikan Air Deras, Tambak udang, dll)
 - .34 Jaringan Terapung
 - .4 Sarana
 - .41 Peralatan
 - .42 Kapal
 - .43 Pelabuhan
 - .5 Pengusaha
 - .6 Nelayan
- 524 Peternakan
- .1 Program
 - .11 Susu Ternak Rakyat
 - .12 Telur
 - .13 Daging
 - .14 Kulit
 - .2 Sarana Usaha Ternak
 - .21 Pembibitan
 - .22 Kandang Ternak
 - .3 Kesehatan Hewan
 - .31 Penyakit Hewan
 - .32 Pos Kesehatan Hewan
 - .33 Tesi Pullorum
 - .34 Karantina
 - .35 Pemberantasan Penyakit Hewan termaksud Usaha Pencegahannya
 - .4 Perunggasan
 - .5 Pengembangan Ternak
 - .51 Inseminasi Ternak
 - .52 Pembibitan/Bibit Unggul
 - .53 Penyebaran Ternak
 - .6 Makanan Ternak
 - .7 Tempat Pemotongan hewan
 - .8 Data Peternakan
- 525 Perkebunan
- .1 Program
 - .2 Produksi
 - .21 Karet
 - .22 Teh
 - .23 Tembakau
 - .24 Tebu
 - .25 Cengkeh
 - .26 Kopra
 - .27 Kopi
 - .28 Coklat
 - .29 Aneka Tanaman
- 526 -
- 527 -
- 528 -

- 530 PERINDUSTRIAN
- 531 Industri Logam
- 532 Industri Mesin/elektronik
- 533 Industri Kimia/Farmasi
- 534 Industri Tekstil
- 535 Industri Makanan/Minuman
- 536 Aneka Industri/Perusahaan
- 537 Aneka Kerajinan
- 538 Usaha Negara/BUMN
 - .1 Perjan
 - .2 Perum
 - .3 Persero/PT, CV
- 539 Perusahaan Daerah/BUMD/BULD

- 540 PERTAMBANGAN
- 541 Minyak Bumi/Bensin
 - .1 Pengusahaan
- 542 Gas Bumi
 - .1 Eksploitasi/Pergeboran
 - .11 Kontrak Kerja
 - .2 Penanganan, Meliputi : Tangki, Pompa, Tanker
- 543 Aneka Tambang
 - .1 Timah
 - .2 Aluminium, Boksit
 - .3 Besi Termasuk Besi Tua
 - .4 Tembaga
 - .5 Batu Bara
- 544 Logam Mulia, Emas, Intan, Perak
- 545 Logam
- 546 Geologi
 - .1 Vulkanologi
 - .11 Pengawasan Gunung Berapi
 - .2 Sumur Artesis, Air Bawah Tanah
- 547 Hidrologi
- 548 Kesamudraan
- 549 Pesisir Pantai

- 550 PERHUBUNGAN
- 551 Perhubungan Darat
 - .1 Lalu Lintas Jalan Raya, Sungai, Danau
 - .11 Keamanan Lalu Lintas, Rambu-Rambu
 - .2 Angkutan Jalan Raya
 - .21 Perizinan
 - .22 Terminal
 - .23 Alat Angkutan
 - .3 Angkutan Sungai
 - .31 Perizinan
 - .32 Terminal
 - .33 Pelabuhan
 - .4 Angkutan Danau
 - .41 Perizinan
 - .42 Terminal
 - .43 Pelabuhan
 - .5 Feri
 - .51 Perizinan
 - .52 Terminal
 - .53 Pelabuhan
 - .6 Perkereta apian

- 552 Perhubungan Laut
 - .1 Lalu Lintas Angkutan Laut, Pelayanan Umum
 - .11 Keamanan Lalu Lintas, Rambu-Rambu
 - .12 Pelayanan Dalam Negeri
 - .13 Pelayanan Luar Negeri
 - .2 Perkapalan Alat Angkutan
 - .3 Pelabuhan
 - .4 Pengerukan
 - .5 Penjagaan Pantai
- 553 Perhubungan Udara
 - .1 Lalu Lintas Udara/Keamanan Lalu Lintas Udara
 - .2 Pelabuhan Udara
 - .3 Alat Angkutan
- 554 Pos
- 555 Telekomunikasi
 - .1 Telepon
 - .2 Telegram
 - .3 Telex/SSB, Faximile
 - .4 Satelit, Internet
 - .5 Stasiun Bumi, Parabola
- 556 Pariwisata dan Rekreasi
 - .1 Obyek Kepariwisataaan Taman Mini Indonesia Indah
 - .2 Perhotelan
 - .3 Travel service
 - .4 Tempat Rekreasi
- 557 Meteorologi
 - .1 Ramalan Cuaca
 - .2 Curah Hujan
 - .3 Kemarau Panjang
- 558 -
- 559 -
- 560 TENAGA KERJA
 - .1 Pengangguran
- 561 Upah
- 562 Penempatan Tenaga Kerja,TKI
- 563 Latihan Kerja
- 564 Tenaga Kerja
 - .1 Butsi
 - .2 Padat Karya
 - .3 Ausorcing
- 565 Perselisihan Perburuhan
- 566 Keselamatan Kerja
- 567 Pemutusan Hubungan Kerja
- 568 Kesejahteraan Buruh
- 569 Tenaga Orang Asing
- 570 PERMODALAN
- 571 Modal Domestik
- 572 Modal Asing
- 573 Modal Patungan (*Joint Venture*)/Penyertaan Modal
- 574 Pasar Uang dan Modal
- 575 Saham
- 576 Belanja Modal
- 577 Modal Daerah
- 580 PERBANKAN/MONETER
- 581 Kredit

- 582 Investasi
- 583 Pembukaan, Perubahan, Penutupan Rekening Deposito
- 584 Bank Pembangunan Daerah
- 585 Asuransi Dana Kecelakaan Lalu Lintas
- 586 Alat Pembayaran, Cek, Giro, Wesel, Transfer
- 587 Fiskal
- 588 Hutang Negara
- 589 Moneter

- 590 AGRARIA
- 591 Tataguna Hutan
 - .1 Pemetaan dan Pengukuran
 - .2 Perpetaan
 - .3 Penyediaan Data
 - .4 Fatwa Tata Guna Hutan
 - .5 Tanah Kritis
- 592 Landreform
 - .1 Redistribusi
 - .11 Pendaftaran Pemilikan dan Pengurusan
 - .12 Penentuan Tanah Obyek Landreform
 - .13 Pembagian Tanah Obyek Landreform
 - .14 Sengketa Redistribusi Tanah Obyek Landreform
 - .2 Ganti Rugi
 - .21 Ganti Rugi Tanah Kelebihan
 - Meliputi : Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan Tanah
 - .22 Ganti Rugi Tanah Absentee
 - Meliputi : Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee
 - .23 Ganti Rugi Tanah Partikelir
 - Meliputi : Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir
 - .3 Bagi Hasil
 - .31 Penetapan Imbangan Bagi Hasil
 - .32 Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
 - .33 Sengketa Perjanjian Bagi Hasil
 - .4 Gadai Tanah
 - .41 Pendaftaran Pemilikan Dan Pengurusan
 - .42 Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
 - .43 Sengketa Gadai Tanah
 - .5 Bimbingan dan Penyuluhan
 - .6 Pengembangan
 - .7 Yayasan dana Landreform
- 593 Pengurusan Hak-Hak Tanah
 - Penyusunan Program dan Bimbingan Teknis
 - .1 Sewa Tanah
 - .11 Sewa Tanah untuk Tanaman tertentu : Tebu, Tembakau, Rosela, Corchorus
 - .2 Hak Milik
 - .21 Perorangan
 - .22 Badan Hukum
 - .3 Hak Pakai
 - .31 Perorangan
 - .311 Warga Negara Indonesia
 - .312 Warga Negara Asing
 - .32 Badan Hukum
 - .321 Badan Hukum Indonesia
 - .322 Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat, Kantor Dagang Asing
 - .33 Tanah, Gedung-gedung Negeri
 - .4 Guna Usaha

- .41 Perkebunan Besar
- .42 Perkebunan Rakyat
- .43 Peternakan
- .44 Perikanan
- .45 Kehutanan
- .5 Hak Guna Bangunan
 - .51 Perorangan
 - .52 Badan Hukum
 - .53 P3MB (Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda)
 - .54 Badan Hukum Asing Belanda-PRK No. 5/65
 - .55 Pemulihan Hak (Penpres 4/1960)
- .6 Hak Pengelolaan
 - .61 Perum Perimnas, *Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate*
 - .62 Perusahaan Daerah, Pembangunan Perumahan Transmigrasi
- .7 Sengketa Tanah
 - .71 Peradilan Perkara Tanah
- .8 Pencabutan dan Pembebasan Tanah
 - .81 Pencabutan Hak
 - .82 Pembebasan Tanah
 - .83 Ganti Rugi Tanah
- 594 Pendaftaran Tanah
 - .1 Pengukuran/Pemetaan
 - .11 Fotogrametri
 - .12 Terrestrial
 - .13 Triangulasi
 - .14 Peralatan
 - .2 Dana Pengukuran (Permen Agraria No. 6/1995)
 - .3 Sertifikat
 - .4 Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT)
- 595 Lahan Transmigrasi
 - .1 Tata Guna Tanah
 - .2 Landreform
 - .3 Pengurusan Hak-Hak Tanah
 - .4 Pendaftaran Tanah
- 596 -
- 597 -
- 598 -
- 599 -

PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

- 601 Tata Bangunan dan Konstruksi dan Industri Konstruksi
- 602 Kontraktor Pemborong
 - .1 Tender
 - .2 Penunjukan
 - .3 Prakualifikasi
 - .31 Daftar Rekanan Mampu (DRM)
 - .32 Tanda Daftar Rekanan (TDR)
- 603 Arsitektur
- 604 Bahan Bangunan
 - .1 Tanah dan Batu Seperti: Batu Belah, *Sleen Slaag, Split* dan sebagainya
 - .2 Aspal Aspal buatan, aspal alam (Butan)
 - .3 Besi dan Logam Lainnya
 - .31 Besi Beton
 - .32 Besi Profil (Konstruksi)

- .33 Paku
- .34 Aluminium Profil
- .4 Bahan Pelindung dan Pengawet (Cat, Tech Oil, Pengawet Kayu)
- .5 Semen
- .6 Kayu
- .7 Bahan Penutup Atap (Genteng, Asbes Gelombang, Seng dan Sebagainya)
- .8 Alat - Alat Penggantung Dan Pengunci
- .9 Bahan Bangunan Lainnya
- 605 Instalasi
 - .1 Instalasi Bangunan
 - .2 Instalasi Listrik
 - .3 Instalasi Air Sanitasi
 - .4 Instalasi Pengatur Udara
 - .5 Instalasi Akustik
 - .6 Instalasi cahaya/Penerangan
- 606 Konstruksi pencegahan
 - .1 Konstruksi pencegahan terhadap kebakaran
 - .2 Konstruksi pencegahan terhadap gempa
 - .3 Konstruksi pencegahan terhadap angin/udara/panas
 - .4 Konstruksi pencegahan terhadap kegaduhan
 - .5 Konstruksi pencegahan terhadap gas/eksplosive
 - .6 Konstruksi pencegahan terhadap serangan
 - .7 Konstruksi pencegahan terhadap radiasi atom
- 607 -
- 608 -
- 609 -
- 610 PENGAIRAN
- 611 Irigasi
 - .1 Bangunan waduk
 - .11 Bendungan
 - .12 Tanggul
 - .13 Pelimpahan Banjir
 - .14 Menara Pengambilan
 - .2 Bangunan pengambilan
 - .21 Bendungan
 - .22 Bendungan dengan pintu bilas
 - .23 Bendungan dengan pompa
 - .24 Pengambilan Bebas
 - .25 Pengambilan Bebas dengan pompa
 - .26 Pengambilan Bebas dengan Pompa
 - .27 Sumur dengan Pompa
 - .28 Kantung Lumpur
 - .29 Silt Ekstraktor
 - .3 Bangunan pembawa
 - .31 Saluran
 - .311 Saluran Induk
 - .312 Saluran Sekunder
 - .313 Suplesi
 - .314 Tersier
 - .315 Saluran kwarter
 - .316 Saluran pasangan
 - .317 Saluran tertutup/terowongan
 - .32 Bangunan
 - .321 Bangunan bagi
 - .322 Bangunan bagi dan sadap

- .323 Bangunan sadap
- .324 Bangunan check
- .325 Bangunan terjun
- .33 Box tersier
- .34 Got miring
- .35 Talang
- .36 Syphon
- .37 Gorong gorong
- .38 Pelimpah samping
- .4 Bangunan Pembuang
 - .41 Saluran
 - .411 Saluran Pembuang Induk
 - .412 Saluran Pembuang Sekunder
 - .413 Saluran Pembuang Tersier
 - .42 Bangunan
 - .421 Bangunan Outlet
 - .422 Bangunan Terjun
 - .423 Bangunan Penahan Banjir
 - .43 Gorong gorong pembuang
 - .44 Talang pembuang
 - .45 Syhpon pembuang
- .5 Bangunan lainnya
 - .51 Jalan
 - .511 Jalan Inspeksi
 - .512 Jalan Logistik Waduk Lapangan
 - .52 Jembatan
 - .521 Jembatan Inspeksi
 - .522 Jembatan hewan
 - .53 Tangga Cuci
 - .54 Kubangan Kerbau
 - .55 Waduk Lapangan
 - .56 Bangunan Penunjang
 - .57 Jaring an Telepon
 - .58 Stasiun Argo
- 612 Folder
 - .1 Tanggul Keliling
 - .11 Tanggul
 - .12 Bangunan Penutup Sungai
 - .13 Jembatan
 - .2 Bangunan Pembawa
 - .21 Saluran
 - .211 Saluran Muka
 - .212 Saluran Pembawa Waduk
 - .213 Saluran Pembawa Sekunder
 - .22 Stasiun Pompa Pemasukan
 - .23 Bangunan Bagi
 - .24 Gotong Royong
 - .25 Syphon
 - .3 Bangunan Pembuang
 - .31 Stasiun Pompa Pembuang
 - .32 Saluran
 - .321 Saluran Pembuang Induk
 - .322 Saluran Pembuang Sekunder
 - .33 Pintu Air Pembuang
 - .34 Gotong-Goyong Pembuangan
 - .35 Syphon Pembuangan
 - .4 Bangunan Lainnya
 - .41 Bangunan

- .411 Bangunan Pengukur Air
- .412 Bangunan Pengukur Curah Hujan
- .413 Bangunan Gudang Stasiun Pompa
- .414 Bangunan Listrik Stasiun Pompa
- .42 Rumah Petugas Eksploitasi
- 613 Pasang Surut
 - .1 Bangunan pembawa
 - .11 Saluran
 - .111 Saluran Pembuang Induk
 - .112 Saluran Pembawa Sekunder
 - .113 Saluran Pembawa Tersier
 - .114 Saluran Penyimpanan Air
 - .12 Bangunan Pintu Pemasukan
 - .2 Bangunan Pembuangan
 - .21 Saluran
 - .211 Saluran Pembuang Induk
 - .212 Saluran Pembuang Sekunder
 - .213 Saluran Pembuangan Tersier
 - .214 Saluran pembuangan air
 - .22 Bangunan Pintu pemasukan
 - .3 Bangunan Lainnya
 - .31 Kolam Pasang
 - .32 Saluran
 - .321 Saluran Lalu Lintas
 - .322 Saluran Muka
 - .33 Bangunan
 - .331 Bangunan Penangkis Kotoran
 - .322 Bangunan Pengukur Air
 - .333 Bangunan Pengukur Curah Hujan
 - .34 Jalan
 - .35 Jembatan
- 614 Pengendalian Sungai
 - .1 Bangunan Pengaman
 - .11 Tanggul Banjir
 - .12 Pintu Pengatur Banjir
 - .13 Klep Pengatur Banjir
 - .14 Tembok pengaman Talaud
 - .15 Krib
 - .16 Kantung Lumpur
 - .17 Check dam
 - .18 Syphon
 - .2 Saluran pengaman
 - .21 Saluran Banjir
 - .22 Saluran Drainage
 - .23 Corepure
 - .3 Bangunan Lainnya
 - .31 Warning System
 - .32 Stasiun
 - .321 Stasiun Pengukur Curah Hujan
 - .322 Stasiun Pengukur Air
 - .323 Stasiun Pengukur Cuaca
 - .324 Stasiun Pos Penjagaan
- 615 Pengaman Pantai
 - .1 Tanggul
 - .2 Krib
 - .3 Bangunan Lainnya
- 616 Air Tanah

	.1	Stasiun Pompa
	.2	Bangunan Pembawa
	.3	Bangunan Pembuang
	.4	Bangunan Lainnya
617	-	
618	-	
619	-	
620	JALAN	
621	Jalan Kota	
	.1	Daerah Penguasaan
	.11	Tanah
	.12	Tanaman
	.13	Bangunan
	.2	Bangunan Sementara
	.21	Jalan Sementara
	.22	Jembatan Sementara
	.23	Kantor Proyek
	.24	Gedung Proyek
	.25	Barak Kerja
	.26	Laboratorium Lapangan
	.27	Rumah
	.3	Badan Jalan
	.31	Pekerjaan Tanah (Earth Work)
	.32	Stabilisasi
	.4	Perkerasan
	.41	Lapis Pondasi Bawah
	.42	Lapis Pondasi
	.43	Lapis Permukaan
	.5	Drainage
	.51	Parit Tanah
	.52	Gorong gorong (Culvert)
	.6	Buku Trotuir
	.61	Tanah
	.62	Perkerasan
	.63	Pasangan
	.7	Median
	.71	Tanah
	.72	Tanaman
	.73	Perkerasan
	.74	Pasangan
	.8	Daerah Samping
	.81	Tanaman
	.82	Pagar
	.9	Bangunan Pelengkap dan Pengamanan
	.91	Rambu-rambu/Tanda -tanda Lalu Lintas
	.92	Lampu Penerangan
	.93	Lampu Pengatur Lalu Lintas
	.94	Patok-patok KM
	.95	Patok-patok ROW (Sempadan)
	.96	Rel Pengaman
	.97	Pagar
	.98	Turap Penahan
	.99	Bronjong
622	Jalan Luar Kota	
	.1	Daerah Penguasaan
	.11	Tanah
	.12	Tanaman

	.13	Bangunan
	.2	Bangunan sementara
	.21	Jalan Sementara
	.22	Jembatan Sementara
	.23	Kantor Proyek
	.24	Gedung Proyek
	.25	Barak Kerja
	.26	Laboratoprium lapangan
	.27	Rumah
	.3	Badan Jalan
	.31	Pekerjaan Tanah (Eart Work)
	.32	Stabilisasi
	.4	Perkerasan
	.41	Lapisan Pondasi Bawah
	.42	Lapisan Pondasi
	.43	Lapisan Permukaan
	.5	Drainage
	.51	Parit tanah
	.52	Gorong-gorong (curvert)
	.53	Sub Drainge
	.6	Trotuir
	.61	Tanah
	.62	Perkerasan
	.7	Median
	.71	Tanah
	.72	Tanaman
	.73	Perkerasan
	.74	Pasangan
	.8	Daerah samping
	.81	Tanaman
	.82	Pagar
	.9	Bangunan Pelengkap dan Pengamanan
	.91	Rambu-rambu/Tanda-tanda lalu lintas
	.92	Lampu Penerangan
	.93	Lampu pengatur Lalu lintas
	.94	Patok patok KM
	.95	Patok patok R.O.W (sempadan)
	.96	Rel-rel Pengaman
	.97	Pagar
	.98	Turap Pengaman
	.99	Bronjong
623	-	
624	-	
625	-	
630	JEMBATAN	
631	Jembatan pada Jalan Kota	
	.1	Daerah Penugasan
	.11	Tanah
	.12	Tanaman
	.13	Bangunan
	.2	Bangunan sementara
	.21	Jalan Sementara
	.22	Jembatan Sementara
	.23	Kantor Proyek
	.24	Gedung Proyek
	.25	Barak Kerja

- .26 Laboratoprium lapangan
- .27 Rumah
- .3 Pekerjaan Tanah (Earth Work)
- .31 Galian Tanah
- .32 Timbunan Tanah
- .4 Pondasi
- .41 Pondasi Kepala Jalan
- .42 Pondasi Pilar
- .43 Angker
- .5 Bangunan Bawah
- .51 Kepala Jembatan
- .52 Pilar
- .53 Piloan
- .54 Landasan
- .6 Bangunan
- .61 Gelagar
- .62 Lantai
- .63 Perkerasan
- .64 Jalan Orang/Trotoar
- .65 Sandaran
- .66 Talang Air
- .7 Bangunan/Pengaman
- .71 Turap/ Penahan
- .72 Bronjong
- .73 -
- .74 Kist Dam
- .75 Corepure
- .76 Krib
- .8 Bangunan Pelengkap
- .81 Rambu-rambu/Tanda-tanda lalu lintas
- .82 Lampu Penerangan
- .83 Lampu Pengatur Lalu lintas
- .84 Patok Pengaman
- .85 Patok R.O.W (sempadan)
- .86 Pagar
- .9 Oprit
- .91 Badan
- .92 Perkerasan
- .93 Drainage
- .94 Baku
- .95 Median
- 632 Jembatan Pada Jalan Luar Kota
- .1 Daerah Penguasaan
- .11 Tanah
- .12 Tanaman
- .13 Bangunan
- .2 Bangunan Sementara
- .21 Jalan Sementara
- .22 Jembatan Sementara
- .23 Kantor Proyek
- .24 Gudang Proyek
- .25 Barak Kerja
- .26 Laboratorium Lapangan
- .27 Rumah
- .3 Pekerjaan Tanah (Eart Work)
- .31 Galian Tanah
- .32 Timnunan Tanah
- .4 Pondasi

.41	Pondasi Kepala Jembatan
.42	Pondasi Pilar
.43	Pondasi Angker
.5	Bangunan Bawah
51.	Kepala Jembatan
52.	Pilar
53.	Piloon
54.	Landasan
.6	Bangunan Atas
.61	Gelagar
.62	Lantai
.63	Perkerasan
.64	Jalan Orang/Trotoar
.65	Sandaran
.66	Talang Air
.7	Bangunan Pengaman
.71	Turap/Penahan
.72	Bronjong
.73	Stek Dam
.74	Kist Dam
.75	Corepure
.76	Krib
.8	Bangunan Pelengkap
.81	Rambu-Rambu/Tanda-tanda Lalu Lintas
.82	Lampu Penerangan
.83	Lampu pengatur lalu lintas
.84	Patok Pengaman
.85	Patok ROW (Sempadan)
.86	Pagar
.9	Oprit
.91	Badan
.92	Perkerasan
.93	Drainage
.94	Baku
.95	Median
633	-
634	-
635	-
640	BANGUNAN
641	Bangunan Pemerintah
.1	Gedung Pengadilan
.2	Rumah Pejabat Negara
.3	Gedung DPR
.4	Gedung Balai Kota
.5	Penjara
.6	Perkantoran
642	Bangunan Pendidikan
.1	Taman Kanak kanak
.2	SD dan Sekolah Menengah
.3	Perguruan Tinggi
643	Bangunan Rekreasi
.1	Bangunan Olahraga
.2	Gedung Kesenian
.3	Gedung Pemancar
644	Bangunan Perdagangan
.1	Pusat Perbelanjaan
.2	Gedung Perdagangan

- .3 Bank
- .4 Perkantoran
- 645 Bangunan Pelayanan Umum
 - .1 MCK
 - .2 Gedung Parkir
 - .3 Rumah Sakit
 - .4 Gedung Telkom
 - .5 Terminal Angkutan Udara
 - .6 Terminal Angkutan Air
 - .7 Terminal Angkutan Darat
 - .8 Bangunan Keagamaan
- 646 Bangunan Peninggalan Sejarah
 - .1 Monumen
 - .2 Candi
 - .3 Keraton
 - .4 Rumah Tradisional
- 647 Bangunan Industri
- 648 Bangunan Tempat Tinggal
 - .1 Rumah Perkotaan
 - .11 Inti/Sederhana
 - .12 Sedang/Mewah
 - .2 Rumah Pedesaan
 - .21 Rumah Contoh
- 649 Elemen Bangunan
 - .1 Pondasi
 - .11 Diatas Tiang
 - .2 Dinding
 - .21 Penahan Beban
 - .22 Tidak Menahan Beban
 - .3 Atap
 - .4 lantai/Langit langit
 - .41 Suspended
 - .42 Solid
 - .5 Pintu/Jendela
 - .51 Pintu Harmonik
 - .52 Pintu Biasa
 - .53 Pintu Sorong
 - .54 Jendela Kayu
 - .55 Jendela Sorong
 - .56 Jendela Vertikal
- 650 TATA KOTA
- 651 Daerah Perdagangan/Pelabuhan
 - .1 Daerah Pusat Perbelanjaan
 - .2 Daerah Perkotaan
- 652 Daerah Pemerintah
- 653 Daerah Perumahan
 - .1 Kepadatan Rendah
 - .2 Kepadatan Tinggi
- 654 Daerah Industri
 - .1 Industri Berat
 - .2 Industri Ringan
 - .3 Industri Rumah (Home Industri)
- 655 Daerah Rekreasi
 - .1 Publik Garden
 - .2 Sport dan Playing Fields
 - .3 Open Space
- 656 Transportasi (Tata Letak)

- .1 Jaringan Jalan
- .11 Penerangan Jalan
- .2 Jaringan Kereta Api
- .3 Jaringan Sungai
- 657 Assainering
 - .1 Saluran Pengumpulan
 - .2 Instansi Pengolahan
 - .21. Bangunan
 - .211 Bangunan Penyaringan
 - .212 Bangunan Penghancur Kotoran/Sampah
 - .213 Bangunan Pengendap
 - .214 Bangunan Pengereng Lumpur
 - .22 Unit Disinfektan
 - .23 Unit Perpompaaan
- 658 Kesehatan Lingkungan
 - .1 Persampahan
 - .11 Bangunan Pengumpul
 - .12 Bangunan Pemusnahan
 - .2 Pengotoran Udara
 - .3 Pengotoran Air
 - .31 Air Buangan Industri
 - .4 Kegaduhan
 - .5 Kebersihan Kota
- 659 -
- 660 TATA LINGKUNGAN
 - .1 Persampahan
 - .2 Kebersihan Lingkungan
 - .3 Pencemaran
 - .31 Pencemaran Air
 - .32 Pencemaran Udara
- 661 Daerah Hutan
- 662 Daerah Pertanian
- 663 Daerah Pemukiman
- 664 Pusat Pertumbuhan
- 665 Transportasi
 - .1 Jaringan Jalan
 - .2 Jaringan Kereta Api
 - .3 Jaringan Sungai
- 666 -
- 667 -
- 668 -
- 670 KETENAGAAN
- 671 Listrik
 - .1 Kelistrikan
 - .11 Kelistrikan PLN
 - .12 Kelistrikan Non PLN
 - .2 Pembangkit Tenaga Listrik
 - .21 PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)
 - .22 PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel)
 - .23 PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas)
 - .24 PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Matahari)
 - .25 PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir)
 - .26 PLTPB (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi)
 - .3 Transmisi Tenaga Listrik
 - .31 Gardu Induk/Gardu penghubung/Gardu Trafo

- .32 Saluran Udara Tegangan Tinggi
- .33 Kabel Bawah Tanah
- .4 Distribusi Tenaga Laut
 - .41 Gardu Distribusi
 - .42 Tegangan Rendah
 - .43 Tegangan Menengah
 - .44 Jaringan Bawah Tanah
- .5 Pengusahaan Listrik
 - .51 Sambungan Listrik
 - .52 Penjualan Tenaga Listrik
 - .53 Tarif Listrik
- 672 Tenaga Air
- 673 Tenaga Minyak
- 674 Tenaga Gas
- 675 Tenaga Matahari
- 676 Tenaga Nuklir
- 677 Tenaga Panas Bumi
- 678 Tenaga Uap
- 679 Tenaga Lainnya
- 680 PERALATAN
- 681 -
- 682 -
- 683 -
- 690 AIR MINUM
- 691 Intake
 - .1 Broncaptering
 - .2 Sumur
 - .3 Bendungan
 - .4 Saringan (Screen)
 - .5 Pintu Air
 - .6 Saluran Pembawa
 - .7 Alat ukur
 - .8 Perpompaan
- 692 Transmisi Air Baku
 - .1 Perpipaan
 - .2 Katup Udara (Air Refill)
 - .3 Katup Pengurus (Blow Off)
 - .4 Bak Pelepas Tekanan
 - .5 Jempatan Pipa
 - .6 Syphon
- 693 Instalasi Pengelolaan
 - .1 Bangunan Ukur
 - .2 Bangunan Aerasi
 - .3 Bangunan Pengendapan
 - .4 Bangunan Pembubuh Bahan Kimia
 - .5 Bangunan Pengaduk
 - .6 Bangunan Saringan
 - .7 Perpompaan
 - .8 Clear Hell
- 694 Distribusi
 - .1 Reservoirs Menara Bawah Tanah
 - .11 Menara
 - .12 Reservoirs diBawah tanah

- .2 Perpipaan
- .3 Perpompaan
- .4 Jembatan Pipa
- .5 Syphon
- .6 Hydran
 - .61 Hydran Umum
 - .62 Hydran Kebakaran
- .7 Katup
 - .71 Katup Udara (Air Relief)
 - .72 Katup Pelepas
- .8 Bak Pelepas Tekanan (Pressure Reducing Valve)
- 695 -
- 696 -
- 697 -
- 698 -
- 699 -

PENGAWASAN

700 PENGAWASAN

- 701 Bidang Urusan Dalam
- 702 Bidang Peralatan
- 703 Bidang Kekayaan Daerah
- 704 Bidang Perpustakaan /Dokumentasi/Kearsipan Sandi
- 705 Bidang Perencanaan
- 706 Bidang Organisasi/Ketatalaksanaan
- 707 Bidang Penelitian
- 708 Bidang Kompetenasi
- 709 Bidang Perjalanan Dinas
- 710 Bidang Pemerintahan
- 711 Bidang Pemerintahan Pusat
- 712 Bidang Pemerintahan Propinsi
- 713 Bidang Pemerintahan Kabupaten/Kota
- 714 Bidang Pemerintahan Desa
- 715 Bidang MPR/DPR
- 716 Bidang DPRD Propinsi
- 717 Bidang DPRD Kabupaten/Kota
- 718 Bidang Hukum
- 719 Bidang Hubungan Luar Negeri
- 720 BIDANG POLITIK
- 721 Bidang Kepartaian
- 722 Bidang Organisasi Kemasyarakatan
- 723 Bidang Organisasi Profesi dan Fungsional
- 724 Bidang Organisasi Pemuda
- 725 Bidang Organisasi Buruh,Tani, dan Nelayan
- 726 Bidang Organisasi Wanita
- 727 Bidang Pencalonan umum
- 730 BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN
- 731 Bidang Pertahanan
- 732 Bidang Kemiliteran
- 733 Bidang Perlindungan Masyarakat
- 734 Bidang Keamanan
- 735 Bidang Kejahatan
- 736 Bidang Bencana
- 737 Bidang Kecelakaan

738	-
739	-
740	BIDANG KESEJAHTRAAN RAKYAT
741	Bidang Pembangunan Desa
742	Bidang Pendidikan
743	Bidang Kebudayaan
744	Bidang Kesehatan
745	Bidang Agama
746	Bidang Sosial
747	Bidang Kependudukan
748	Bidang Media Massa
749	-
750	BIDANG PEREKONOMIAN
752	Bidang Perdagangan
753	Bidang Pertanian
754	Bidang Perindustrian
755	Bidang Pertambangan/Kesamudraan
755	Bidang Perhubungan
756	Bidang Tenaga Kerja
757	Bidang Permodalan
758	Bidang Perbankan/Moneter
759	Bidang Agraria
760	BIDANG PU DAN KETENAGAAN
761	Bidang Pengairan
762	Bidang Jalan
763	Bidang Jembatan
764	Bidang Bangunan
765	Bidang Tata Kota
766	Bidang Lingkungan
767	Bidang Ketenagaan
768	Bidang Peralatan
769	Bidang Air Minum
770	-
771	-
772	-
780	BIDANG KEPEGAWAIAN
781	Bidang Pengadaan Pegawai
782	Bidang Mutasi Pegawai
783	Bidang Kedudukan Pegawai
784	Bidang Kesejahteraan Pegawai
785	Bidang Cuti
786	Bidang Penilaian
787	Bidang Tata Usaha Kepegawaian
788	Bidang Pemberhentian Pegawai
789	Bidang Pendidikan Pegawai
790	BIDANG KEUANGAN
791	Bidang Anggaran
792	Bidang Otorisasi
793	Bidang Verifikasi
794	Bidang Pembukuan
795	Bidang Perbendaharaan
796	Bidang Pembinaan Kebendaharaan
797	Bidang Pendapatan

KEPEGAWAIAN

800 KEPEGAWAIAN

Klasifikasi disini : Kebijakan kepegawaian

- .1 Perencanaan
- .2 Penelitian
- .3 Pengaduan
- .4 Team
- .5 Statistik
- .6 Peraturan Perundang-undangan

810 Pengadaan
Meliputi Lamaran, Pengujian Kendaraan dan Pengangkatan calon pegawai

811 Lamaran

- .1 Testing
- .2 Screening
- .3 Panggilan

812 Pengujian Kesehatan

813 Pengangkatan Calon Pegawai

- .1 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan I
- .2 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan II
- .3 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan III
- .4 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan IV

814 Pengangkatan Tenaga Lepas

- .1 Pengangkatan Tenaga Bulanan/Tenaga Kontrak
- .2 Pengangkatan Tenaga Harian
- .3 Pengangkatan Tenaga Pensiun

815 -

816 -

817 -

820 MUTASI

Meliputi pengangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pemindahan, pelimpahan, tugas belajar, wajib belajar

821 Pengangkatan

- .1 Pengangkatan menjadi pegawai negeri tetap
 - .11 Pengangkatan menjadi pegawai negeri golongan 1
 - .12 Pengangkatan menjadi pegawai negeri golongan 2
 - .13 Pengangkatan menjadi pegawai negeri golongan 3
 - .14 Pengangkatan menjadi pegawai negeri golongan 4
 - .15 Pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil yang cuti di luar Tanggungan Negara
- .2 Pengangkatan dalam jabatan, pembebasan dari jabatan, berita acara serah terima jabatan
 - .21 Sekjen/Dirjen/Irjen/Kaban
 - .22 Kepala Biro/Direktur/Kepala Pusat/Sekretaris/Kepala Dinas/Asisten Sekwilda
 - .23 Kepala Bidang/Kepala Sub Direktor/Kepala Bidang/Inspektur Pembantu
 - .24 Kepala Sub bagian/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/ Pemeriksa
 - .25 Residen/Pembantu Gubernur
 - .26 Wedana/Pembantu Bupati

- .27 Camat
- .28 Lurah Administratif (Lurah Desa)
- .29 Jabatan Lainnya
- 822 Kenaikan Gaji Berkala
 - .1 Pegawai Golongan 1
 - .2 Pegawai Golongan 2
 - .3 Pegawai Golongan 3
 - .4 Pegawai Golongan 4
- 823 Kenaikan Pangkat/Pengangkatan
 - .1 Pegawai Golongan 1
 - .2 Pegawai Golongan 2
 - .3 Pegawai Golongan 3
 - .4 Pegawai Golongan 4
- 824 Pemindahan/Pelimpahan/Perbantuan
 - .1 Pegawai Golongan 1
 - .2 Pegawai Golongan 2
 - .3 Pegawai Golongan 3
 - .4 Pegawai Golongan 4
 - .5 Lolos Butuh
 - .6 Kurikulum dan Silabi
- 825 Destasering dan penempatan kembali
- 826 Penunjukan tugas belajar
 - .1 Dalam Negeri
 - .2 Luar Negeri
 - .3 Tunjangan Belajar
 - .4 Penempatan Kembali
- 827 Wajib Militer
- 828 Mutasi Dengan Instansi Lainnya
- 829 -

- 830 KEDUDUKAN
Meliputi perhitungan masa kerja, penyesuaian pangkat/gaji
penghargaan ijazah dan jenjang pangkat
- 831 Perhitungan Masa Kerja
- 832 Penyesuaian Pangkat/Gaji
 - .1 Pegawai Golongan 1
 - .2 Pegawai Golongan 2
 - .3 Pegawai Golongan 3
 - .4 Pegawai Golongan 4
- 833 Penghargaan Ijazah/Penyusunan
- 834 Jenjang Pangkat/Eselonering
- 835 -
- 836 -
- 837 -

- 840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI
Meliputi : Tunjangan, dana, perawatan kesehatan, koperasi distribusi
perumahan/tanah, bantuan sosial, rekreasi dan dispensasi
- 841 Tunjangan
 - .1 Jabatan
 - .2 Kehormatan
 - .3 Kematian/Uang Duka
 - .4 Tunjangan Hari Raya
 - .5 Perjalanan Dinas Tetap/cuti/pindah
 - .6 Keluarga
 - .7 Sandang, Pangan, Papan (Bapertarum)
- 842 Dana

- .1 Taspen
- .2 Kesehatan
- .3 Asuransi
- 843 Perawatan Kesehatan
 - .1 Poliklinik
 - .2 Perawatan Dokter
 - .3 Obat - obatan
 - .4 Keluarga Berencana
- 844 Koperasi/Distribusi
 - .1 Distribusi Pangan
 - .2 Distribusi Sandang
 - .3 Distribusi Papan
- 845 Perumahan/Tanah
 - .1 Perumahan Pegawai
 - .2 Tanah Kapling
 - .3 Losmen/Hotel
- 846 Bantuan Sosial
 - .1 Bantuan Kebakaran
 - .2 Bantuan Kebanjiran
- 847 -
- 848 -
- 849 -
- 850 Cuti
Meliputi Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Hamil, Cuti Naik Haji, Cuti diluar Tanggungan Negara, dan Cuti alasan lain
- 851 Cuti Tahunan
- 852 Cuti Besar
- 853 Cuti Sakit
- 854 Cuti Hamil
- 855 Cuti Naik Haji/Umroh
- 856 Cuti diluar Tanggungan Negara
- 857 Cuti Alasan lain/Alasan Penting
- 858 -
- 859 -
- 860 PENILAIAN
Meliputi penghargaan, hukuman, konduite, ujian dinas, penilaian kekayaan pribadi dan rehabilitas
- 861 Penghargaan
 - .1 Bintang/Satyalencana
 - .2 Kenaikan Pangkat Anumerta
 - .3 Kenaikan Gaji Istimewa
 - .4 Hadiah Berupa Uang
 - .5 Pegawai Teladan
- 862 Hukuman
 - .1 Teguran Peringatan
 - .2 Penundaan Kenaikan Gaji
 - .3 Penurunan Pangkat
 - .4 Pemindahan

Catatan : Pemberhentian untuk sementara waktu dan pemberhentian tidak dengan hormat Lihat 887 dan 888
- 863 Konduite, DP3, Disiplin Pegawai
- 864 Ujian Dinas
 - .1 Tingkat 1
 - .2 Tingkat 2
 - .3 Tingkat 3
- 865 Penilaian kehidupan Pegawai negeri

- Meliputi : Petunjuk Pelaksanaan Hidup sederhana, Penilaian kekayaan Pribadi (LP2P)
- 866 Rehabilitasi / Pengaktifan Kembali
- 867 -
- 868 -
- 869 -
- 870 Tata Usaha Kepegawaian
Meliputi : Formazi, bezetting, registrasi, daftar riwayat hidup, hak, penggajian, sumpah/janji dan korps pegawai
- 871 Formazi
- 872 Bezetting/Daftar Urut Kepegawaian
- 873 Registrasi
- .1 NIP
- .2 KARPEG
- .3 Legitimasi/Tanda Pengenal
- .4 Daftar Keluarga, Perkawinan, Perceraian, Karis, Karsu
- 874 Daftar Riwayat Pekerjaan
- .1 Tanggal Lahir
- .2 Penggantian Nama
- .3 Izin Kepartaian Organisasi
- 875 Kewenangan Mutasi Kepegawaian
- .1 Pelimpahan Wewenang
- .2 Spesimen Tanda Tangan
- 876 Penggajian
- .1 SKPP
- 877 Sumpah/Janji
- 878 Korps Pegawai
- 879 -
- 880 PEMBERHENTIAN PEGAWAI
Meliputi atas pemberhentian, permintaan sendiri, dengan hak pensiun, karena meninggal dunia, alasan lain dengan diberi uang pesangon, uang tunggu untuk sementara waktu dan pemberhentian dengan tidak hormat
- 881 Permintaan Sendiri
- 882 Dengan Hak pensiun
- .1 Pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai Negeri Golongan 1
- .2 Pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai Negeri Golongan 2
- .3 Pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai Negeri Golongan 3
- .4 Pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai Negeri Golongan 4
- .5 Pensiun Janda / Duda
- .6 Pensiun Yatim Piatu
- .7 Uang Muka pensiun
- 883 Karena Meninggal
- .1 Karena meninggal dalam tugas
- 884 Alasan Lain
- 885 Uang Pesangon
- 886 Uang Tunggu
- 887 Untuk sementara waktu
- 888 Tidak dengan hormat
- 889 -
- 890 PENDIDIKAN PEGAWAI
Meliputi : Perencanaan, pendidikan ke luar negeri, metode, tenaga pengajar, administrasi penddikan tenaga pengajar, administrasi pendidikan
- 891 Perencanaan

- .1 Program
- .2 Kurikulum dan Silabus
- .3 Proposal (TOR)
- 892 Pendidikan Reguler/Kader
 - .1 IPDN/APDN
 - .2 Kursus-kursus reguler
- 893 Pendidikan dan Pelatihan/Non Reguler
 - .1 LEMHANAS
 - .2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural, SPATI, SPAMEN, SPAMA, ADUMLA, ADUM
 - .3 Kursus-kursus/Penataran
 - .4 Diklat Tekhnis, Fungsional dan Manajemen Pemerintah
 - .5 Diklat Lainnya
- 894 Pendidikan Luar Negeri
 - .1 Berkesinambungan/Berkala/Bergelar
 - .2 Non Gelar/Diploma
- 895 Metode
 - .1 Kuliah
 - .2 Ceramah, Simposium
 - .3 Diskusi, Raker, Seminar, Lokakarya, Orientasi
 - .3 Studi Lapangan, KKN, Wydyawisata
 - .5 Tanya Jawab/Sylabi/Modul/Kursil
 - .6 Penugasan
 - .7 Gladi
- 86 Tenaga Pengajar/Widyaiswara/narasumber
 - .1 Moderator
- 897 Administrasi Pendidikan
 - .1 Tahun Pengajaran
 - .2 Persyaratan, pendaftaran, testing, ujian
 - .3 STTP
 - .4 Penilaian Angka Kredit
 - .5 Laporan Pendidikan dan Pelatihan
- 898 Fasilitas Belajar
 - .1 Tunjangan Belajar
 - .2 Asrama
 - .3 Uang Makan
 - .4 Uang Transport
 - .5 Uang Buku
 - .6 Uang Ujian
 - .7 Uang Semester/Uang Kuliah
 - .8 Uang Saku
- 899 Sarana
 - .1 Bantuan sarana belajar
 - .2 Bantuan Alat alat tulis
 - .3 Bantuan sarana belajar lainnya

KEUANGAN

- 900 KEUANGAN**
- 901 Nota Keuangan
- 902 APBN
- 903 APBD
- 904 APBN-P
- 905 Dana Lokasi Umum
- 906 Dana Lokasi Khusus
- 907 Dekonsentrasi (Pelimpahan Dana Dari Pusat ke Daerah)

908	-			
909	-			
910	Anggaran			
911	Rutin			
912	Pembangunan			
913	Anggaran Belanja Tambahan			
914	Daftar Isian Kegiatan (DIK)			
	.1 Daftar Usulan Kegiatan (DUK)			
915	Daftar Isian Proyek (DIP)			
	.1 Daftar Usulan Proyek (DUP)			
	.2 Daftar Isian Isian Pengguna Anggaran (DIPA)			
916	Revisi Anggaran			
917	-			
918	-			
920	OTORISASI/SKO			
921	Rutin			
922	Pembangunan			
923	SIAP			
924	Ralat SKO			
925	-			
926	-			
927	-			
930	VERIFIKASI			
931	SPM Rutin (Daftar P8)			
932	SPM Pembangunan (Daftar P8)			
933	Penerimaan (Daftar P6. P7)			
934	SPJ Rutin			
935	SPJ Pembangunan			
936	Nota Pemeriksaan			
937	SP Pemindahan Pembukuan			
938	-			
939	-			
940	PEMBUKUAN			
941	Penyusunan Perhitungan Anggaran			
942	Permintaan Data Anggaran Laporan Fisik Pembangunan			
943	Laporan Fisik Pembangunan			
944	-			
945	-			
950	Perbendaharaan			
951	Tuntutan Ganti Rugi (ICW pasal 74)			
952	Tuntutan Bendahara			
953	Penghapusan Kekayaan Negara			
954	Pengangkatan/Penggantian Pempinan	Proyek		dan
	Pengangkatan/Pemberhentian Bendaharawan			
955	Specimen Tanda Tangan			
956	Surat Tagihan Piutang, Ikhtisan Bulanan			
957	-			
958	-			
959	-			
960	PEMBINAAN KEBENDAHARAAN			
961	Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas			
962	Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan			

963 Laporan Keuangan Bendaharawan
 964 -
 965 -
 966 -

 970 Pendapatan
 971 Perimbangan Keuangan
 972 Subsidi
 973 Pajak, Ipeda, IHH, IHPH
 974 Retribusi
 975 Bea
 976 Cukai
 977 Pungutan/PNBP
 978 Bantuan
 .1 Bantuan Presiden
 .2 Bantuan Menteri
 .3 Bantuan Gubernur
 .4 Bantuan Bupati
 .5 Bantuan Dharmais
 .6 Bantuan Sosial
 .7 Bantuan Lainnya
 979 -
 980 -
 981 -

 990 Bendaharawan
 991 SKPP/SPP
 992 Teguran SPJ
 993 -
 994 -
 995 - 43

BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

STEMPEL PARAF KOORDINASI DPK KAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA OLEH	PARAF
SEKDA	
ASISTEN <i>Am unun</i>	
KEPALA DPK	
SEKRETARIS DPK	
Kabid Kearsipan	